

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2013. *Asaa, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Perss.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyadi, Lilik. 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni.
- Nirwanto, D, Andhi. 2013. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Nirwanto, D. Andhi. 2013. *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Prasetyo, Teguh. 2004. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss).
- Soemantri, Sri. 2001. *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium General dan Peringatan 40 Tahun Pengabdiannya di Universitas Padjajaran Bandung, hal.1 dalam Ermansjah, Djaja. 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudaryonon dan Natangsa, Surbakti. 2010. *Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanuar, Purwaning. M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Kamus

Charlie Rudyat, -, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Mahardika.

Echols, John. M dan Hassan Shadily.1977. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan undang-undang KUHP.

Surat Edaran Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013 tahun 2008 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Eksekusi Uang Pengganti.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Website

www.KPKNL.go.id